

**PERAN JEJARING AGRIBISNIS DALAM MEMBANGUN  
KEMITRAAN AGRIBISNIS (STUDI PADA PENGEMBANGAN  
KLASTER USAHA PETERNAKAN SAPI  
DI KABUPATEN SUKOHARJO)**

*R. Kunto Adi*

**Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian  
Universitas Sebelas Maret**

**ABSTRAK**

*Tujuan kajian ini antara lain 1). Mengetahui jejaring kemitraan agribisnis dalam pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo, 2). Mengetahui peran jejaring kemitraan agribisnis dalam pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo, dan 3). Mengetahui kondisi yang diperlukan dalam meningkatkan peran jejaring kemitraan agribisnis dalam pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo. Hasil kajian menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo, baik Pemerintah Daerah, SKPD atau dinas terkait, pelaku usaha (UKM), Asosiasi, lembaga penelitian, Perguruan Tinggi, lembaga pembiayaan, dan Non Government (NGOs). Peran stakeholders jejaring agribisnis dalam pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo, antara lain dalam mengkoordinasikan program kegiatan UMKM sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi setiap dinas terkait; menyediakan produk bagi kebutuhan sentra UMKM lain, sedangkan peran lembaga penunjang dalam penyediaan saprodi, pemasaran, penyediaan teknologi/hasil riset, fasilitasi konsultasi, pendampingan usaha, pemberdayaan UMKM. Kondisi yang diperlukan dalam meningkatkan peran stakeholders jejaring agribisnis Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo, antara lain adanya komitmen bersama sentra UMKM dan stakeholders, ketersediaan produk olahan dan bahan baku yang memadai, akses pasar yang mudah, ketersediaan teknologi produksi yang memadai, manajemen usaha yang baik, ketersediaan modal yang memadai, standarisasi produk, infrastruktur sarana dan prasarana distribusi yang memadai, peningkatan skill SDM UMKM, adanya lembaga intermediasi, adanya forum komunikasi bersama, adanya regulasi yang mendukung UMKM, adanya fasilitas penunjang (teknologi, layanan, kredit), infrastruktur dukungan dana operasional, dan lain-lain.*

*Kata Kunci : Jejaring Agribisnis, Kemitraan, Klaster Usaha*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan UMKM di Indonesia cukup pesat, yang ditunjukkan pada tahun 2009, data dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa skala UMKM di Indonesia mencapai 99% dari seluruh unit usaha di Indonesia.

Dari data tersebut ada 41.000 unit usaha menengah, 546.000 unit usaha kecil, dan 52.000.000 unit usaha mikro. Kondisi di Propinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa pada tahun 2010, ekspor non migas sekitar 40% yang berasal dari UMKM. Sedangkan data Bank Indonesia Solo tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang ada terutama di wilayah SOLORAYA sebanyak 557.735 unit usaha, yang secara rinci sebagai berikut : Kota Solo sebanyak 85.319 unit, Kabupaten Wonogiri sebanyak 81.505 unit, Kabupaten Sukoharjo sebanyak 52.000 unit, Kabupaten Klaten sebanyak 89.468 unit, Kabupaten Boyolali sebanyak 86.069 unit, Kabupaten Sragen sebanyak 120.084 unit, dan Kabupaten Karanganyar sebanyak 43.290 unit usaha. Data jumlah UMKM tersebut menunjukkan bahwa potensi UMKM dari sisi jumlah unit usaha sangat potensial, akan tetapi secara kualitas dan potensi ekspor masih kalah bila dibanding usaha besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi UMKM yang cukup besar tersebut tidak didukung oleh kondisi UMKM secara internal maupun eksternal. Kondisi internal UMKM bisa ditunjukkan oleh manajemen yang sederhana (manajemen keluarga), kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah, kualitas produk yang kalah bersaing, akses informasi dan teknologi yang lemah, serta lemahnya akses permodalan. Kondisi tersebut akan menyebabkan UMKM mempunyai daya saing yang lemah, terhadap usaha besar, terutama dalam manajemen, SDM, akses informasi dan teknologi, maupun permodalan.

Pengembangan UKM pada era Otonomi Daerah, terutama di sub sektor agribisnis diarahkan melalui konsep pengembangan UKM dengan pendekatan pengembangan agribisnis dengan berorientasi pada Kemitraan Strategis Agribisnis, dengan melibatkan berbagai pihak atau *stakeholders*. Oleh karena sebagian besar permasalahan pelaku UKM secara umum maupun UKM agribisnis dikarenakan rendahnya akses pelaku UKM terhadap informasi dan teknologi, manajemen, dan sumber permodalan, sehingga berpengaruh terhadap kualitas produk agribisnis yang dihasilkan. Hal tersebut akan mudah dicapai dengan pendekatan Kemitraan Strategis Agribisnis melalui peran aktif pihak-pihak yang berperan aktif dalam jejaring kemitraan agribisnis, yang diharapkan dapat menjembatani kepentingan pelaku UKM agribisnis dengan pihak-pihak lain baik

pemerintah, pelaku UKM lain, swasta, perbankan dan lembaga non perbankan, lembaga penyedia teknologi, dan lembaga-lembaga pendukung lain.

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah sentra agribisnis peternakan sapi di Propinsi Jawa Tengah. Data Dinas Pertanian Subdin Peternakan Kabupaten Sukoharjo tahun 2008 menunjukkan Populasi ternak sapi di Kabupaten Sukoharjo, dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Populasi Ternak Sapi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008

No	Kecamatan	Populasi (ekor)
1	Weru	4.082
2	Bulu	3.625
3	Tawang Sari	993
4	Sukoharjo	492
5	Nguter	1.792
6	Bendosari	3.192
7	Polokarto	4.817
8	Mojolaban	5.647
9	Grogol	447
10	Baki	431
11	Gatak	125
12	Kartasura	473
<b>Jumlah</b>		<b>26.116</b>

Sumber : Dinas Pertanian Subdin Peternakan Kabupaten Sukoharjo (2008)

Permasalahan yang muncul terutama terkait pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo, antara lain kurang optimalnya koordinasi antara sektoral dalam hal ini antara stakeholders terkait baik dari Pemerintah melalui dinas terkait dengan pihak-pihak lain (swasta, asosiasi, UMKM, dan lain-lain), sehingga kemitraan strategis yang semestinya bisa dilaksanakan dengan baik antar *stakeholders* terkait tersebut kurang berjalan optimal, terutama dalam pengembangan di sub sektor agribisnis peternakan sapi di Kabupaten Sukoharjo. Menghadapi kenyataan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan untuk dikaji sebagai berikut :

- a. Siapa saja pihak-pihak yang aktif dalam jejaring agribisnis dalam pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo ?
- b. Bagaimana peran jejaring agribisnis dalam pengembangan agribisnis melalui kemitraan agribisnis, pada Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo?

- c. Bagaimana kondisi yang diperlukan dalam meningkatkan peran jejaring agribisnis dalam pengembangan agribisnis melalui kemitraan agribisnis, pada Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Oleh karena merupakan suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Dalam konteks ini pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan tersebut harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan. Adapun maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “*Win-win Solution Partnership*”. Kesadaran dan saling menguntungkan tidak berarti para pelaku dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. (Hafsah, 2003).

Agribisnis dalam arti luas mencakup semua kegiatan mulai dari pengadaan sarana produksi pertanian (*farm supplies*) sampai dengan tata niaga produk pertanian yang dihasilkan usahatani atau hasil olahannya. Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Pertanian dalam arti luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian (Firdaus, 2008).

Agribisnis dapat dibagi menjadi menjadi tiga sektor yang saling tergantung secara ekonomi, yaitu sektor masukan (*input*), produksi (*farm*), dan sektor keluaran (*output*). Sektor masukan menyediakan perbekalan kepada para pengusaha tani untuk dapat memproduksi hasil tanaman dan ternak (bibit, makanan ternak, pupuk, bahan kimia, mesin pertanian, bahan bakar, dan bahan perbekalan lain, sektor usahatani memproduksi hasil tanaman dan hasil ternak

yang diproses dan disebarkan kepada konsumen akhir oleh sektor keluaran. Dalam hal ini agribisnis mencakup keseluruhan perusahaan yang meliputi seluruh sektor bahan masukan, usahatani, produk yang memasok bahan masukan usahatani, terlibat dalam produksi, dan pada akhirnya menangani pemrosesan, penyebaran, penjualan kepada konsumen akhir (Downey dan Erickson, 1987).

Selama ini pola pembinaan dan pengembangan UMKM, termasuk agribisnis, melupakan tiga persyaratan penting, yaitu *Focused, Strategic and Collective Approach*. Sentra-sentra usaha kecil sejenis/ pendukung yang telah ada dan berkembang secara alamiah diarahkan agar terjalin dalam suatu wadah pembinaan dan pengembangan. Oleh karena itu, untuk menghadapi tingkat persaingan yang tinggi dan modernisasi bisnis, khususnya dalam agribisnis, perlu dikembangkan suatu model klaster agribisnis yang merupakan sistem yang terpadu dari berbagai subsistem yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna meningkatkan efisiensi dan daya saing produk pertanian (Widodo, 2003). Hal tersebut didukung oleh Soetrisno (2003), bahwa pengembangan UMKM di Indonesia selama ini masih belum efektif dan berkelanjutan, oleh karena mengabaikan 3 (tiga) persyaratan, yaitu *focused, strategic and collective approach*. Untuk memungkinkan pendekatan yang *Cost effective* dan *Demand driven*, maka hanya dapat dilakukan apabila “*Cluster of Small Business*” dapat beroperasi dalam batas kawasan yang dekat satu sama lain serta memiliki keterkaitan yang kuat sebagai suatu sistem yang integratif dan produktif.

Pengembangan UMKM melalui pendekatan klaster perlu dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan melaksanakan upaya pengembangan UMKM secara lebih nyata, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan, yang selama ini masih menghadapi banyak kendala. Menurut studi yang dilakukan JICA pada tahun 2004, gambaran umum kondisi klaster di Indonesia antara lain : 1). Kebanyakan UKM-UKM dalam klaster merupakan usaha-usaha mikro yang memiliki ketergantungan kuat kepada para pengumpul lokal sehingga seringkali menghilangkan jiwa kewirausahaan, 2). Produk-produk UKM ditujukan untuk pasar-pasar yang tidak terlalu menuntut teknologi dan kualitasnya, 3). Sebagian besar UKM dalam klaster tidak memiliki keterkaitan

internal satu sama lain sehingga upaya “membangun kepercayaan” (*trust building*) sulit dilakukan, 4). Rendahnya keterkaitan dengan industri dan institusi terkait merupakan kendala yang lumrah ditemui sehingga penguatan klaster sulit dilakukan, dan 5). Sebagian besar klaster memiliki struktur sosial yang mudah bercerai berai dan masih berkuat pada strategi untuk mempertahankan hidup (Bappenas, 2004).

Klaster adalah kelompok usaha industri yang saling terkait. Klaster mempunyai dua elemen kunci, yaitu : 1). Perusahaan dalam klaster harus saling berhubungan, dan 2). Perusahaan-perusahaan tersebut berlokasi di suatu tempat yang saling berdekatan, yang mudah dikenali sebagai suatu kawasan industri. Definisi lain secara umum menyatakan bahwa klaster adalah konsentrasi geografis antara perusahaan-perusahaan yang saling terkait dan bekerjasama, diantaranya pemasok barang, penyedia jasa, industri yang terkait, serta beberapa institusi yang berfungsi sebagai pelengkap (Perguruan Tinggi, lembaga standarisasi, asosiasi perdagangan, lembaga pembiayaan, dan lain-lain) (Bappenas, 2005).

Berdasarkan hasil penelitian Adi dkk (2010), secara umum, masalah-masalah yang dihadapi usaha peternakan sapi di Kabupaten Sukoharjo, dapat dilihat pada Tabel 2. sebagai berikut :

Tabel 2. Masalah Yang Dihadapi Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo

Variabel	Masalah Yang Dihadapi
Bibit Sapi/Sapi Bakalan dan Saprodi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bibit unggul sapi sulit diperoleh, sehingga harga bibit unggul mahal</li> <li>• Pakan ternak bergizi terbatas khususnya jerami, karena gagal panen</li> <li>• Ketersediaan rumput kurang mencukupi</li> <li>• Kualitas rumput masih rendah</li> <li>• Keterbatasan pakan ternak alternatif (ampas tahu, ampas singkong, bekatul, dll) dan harganya mahal</li> <li>• Harga pakan ternak masih tinggi</li> <li>• Keterbatasan lahan hijauan pakan ternak</li> </ul>
Teknologi Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya akses informasi dan teknologi dari dinas terkait (Dinas Peternakan), Lembaga Penelitian, PT, dll</li> <li>• Ketersediaan teknologi pengolahan limbah ternak (pupuk, biogas) masih terbatas</li> </ul>

Pasar dan Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasaran masih terbatas</li> <li>• Sistem penjualan dan kemitraan dagang kurang menguntungkan peternak</li> <li>• Harga jual sapi tidak sesuai dengan biaya produksi</li> <li>• Harga jual sapi rendah, karena ada produk daging sapi impor</li> <li>• Tidak ada standar harga jual sapi</li> <li>• Waktu penjualan sapi tidak tepat karena terdesak kebutuhan ekonomi, sehingga harga rendah</li> </ul>
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan perawatan ternak yang baik dan berkualitas masih rendah</li> <li>• Kemampuan kesehatan hewan, gejala penyakit, gejala kawin masih rendah, sehingga penambahan populasi terhambat</li> </ul>
Persaingan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persaingan usaha dengan sentra peternakan sapi di luar Kabupaten Sukoharjo</li> <li>• Daging sapi impor</li> </ul>
Jasa/Industri Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya manajemen pengelolaan antara industri tahu dan pertanian organik dengan sentra peternakan sapi terkait ketersediaan pakan ternak alternatif</li> </ul>
Permodalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan permodalan lemah, masih mengandalkan modal sendiri</li> <li>• Rendahnya akses pada perbankan, karena belum memahami proses dan persyaratan kredit bank</li> <li>• Manajemen keuangan masih tradisional, belum ada pembukuan keuangan yang baik</li> <li>• Rendahnya kemampuan penyediaan syarat-syarat kredit perbankan, jaminan, ijin usaha, HO, dll</li> <li>• Kredit macet</li> <li>• Pemeliharaan bantuan sapi gaduhan kurang optimal</li> </ul>
Produksi dan Limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limbah kotoran dan urine belum diolah dan dimanfaatkan secara optimal (pupuk, pestisida organik, biogas, dll), biogas sudah ada tetapi belum dioptimalkan pemanfaatannya</li> <li>• Hilangnya kehamilan sapi pada usia 4-5 bulan</li> <li>• Penyakit ternak (gomen, kuku, dll)</li> </ul>
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi kelembagaan klaster ternak sapi belum optimal, belum menjangkau semua wilayah</li> <li>• Kerjasama antar peternak dalam kelompok dan antara kelompok peternak kurang optimal</li> </ul>
Kebijakan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya sosialisasi tentang kesehatan hewan, gejala penyakit, gejala kawin</li> <li>• Kurangnya kerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan terkait masalah kesehatan hewan</li> <li>• Pengendalian penyakit sapi kurang memadai</li> <li>• Inseminasi Buatan kurang memadai/sering gagal</li> </ul>

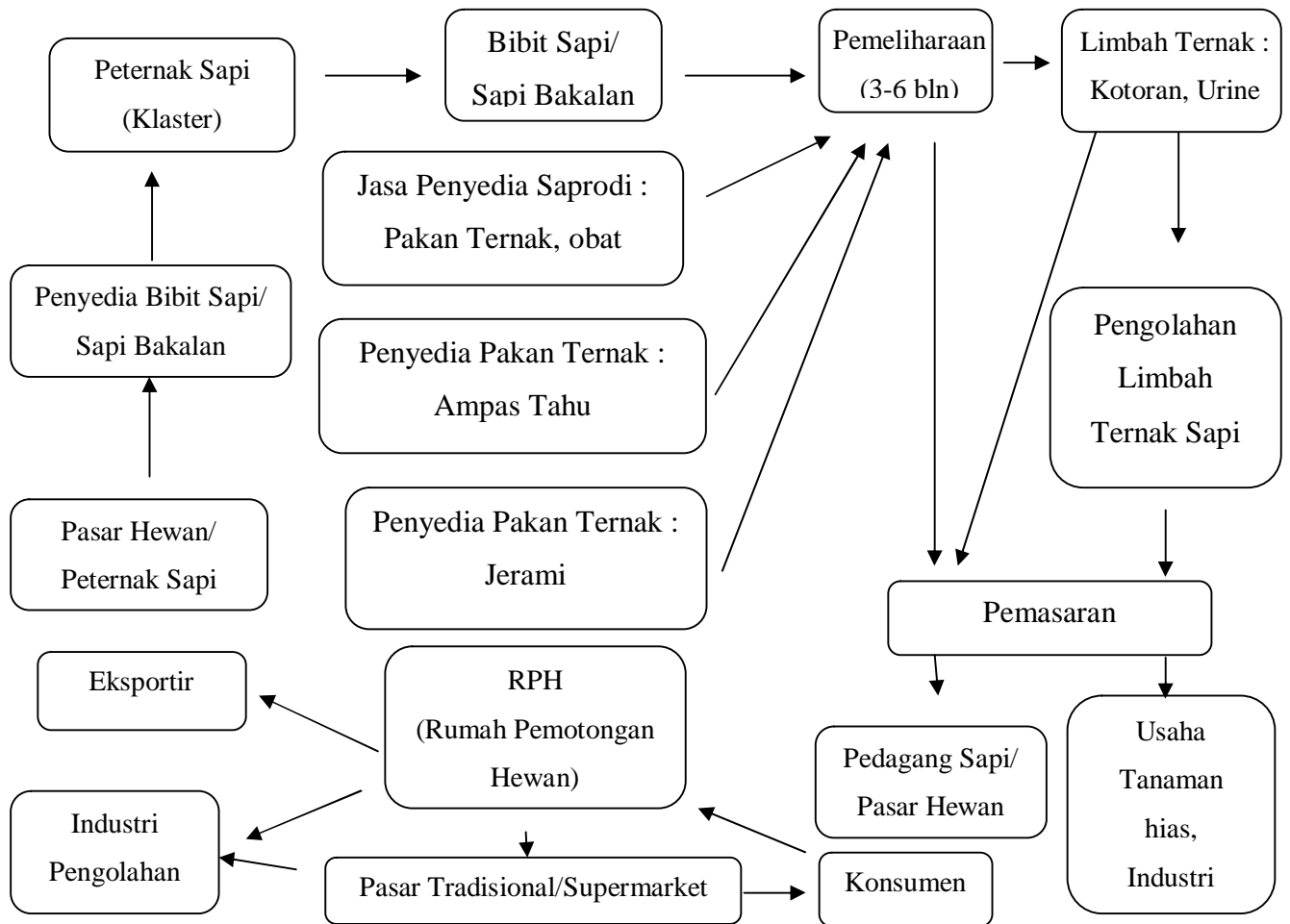
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pelatihan tentang peningkatan kemampuan produksi bagi peternak</li> <li>• Kurangnya pelatihan tentang pemanfaatan biogas</li> </ul>
--	--

Sumber : Adi dkk (2010)

Berbagai permasalahan diatas akan bisa diatasi apabila terwujud sinergi antar *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan agribisnis usaha peternakan sapi di Kabupaten Sukoharjo. Peran *stakeholders* tersebut sangat penting, mengingat setiap pihak tidak hanya menjalankan peran sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya, tetapi juga harus terjadi sinergi antar *stakeholders* dalam pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo.

Jejaring kemitraan agribisnis dalam pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo, dapat ditunjukkan pada rantai nilai dalam pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo. Rantai nilai usaha peternakan sapi dimulai dari kegiatan pada sub sistem agribisnis hulu, yaitu pada penyediaan bibit sapi dan sapi bakalan, serta penyediaan sarana produksi (pakan ternak, obat-obatan), sub sistem *on farm* atau proses produksi mulai dari pemberian pakan sampai dengan menghasilkan sapi siap jual, sub sistem hilir yang meliputi pengolahan hasil dan pemasaran hasil ternak, serta sub sistem pendukung yang meliputi kelembagaan pendukung, pasar, kebijakan pemerintah, dan lain-lain, sebagaimana pada Gambar 1.





Gambar 1. Rantai Nilai Usaha Peternakan Sapi

Sumber : Adi dkk (2010)

## METODOLOGI

Kajian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang memusatkan perhatian pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah actual, dimana data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. Tujuan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau sekelompok orang tertentu, atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih (Surakhmad, 1994). Sedangkan metode penulisan dengan dengan studi pustaka, yaitu dengan melakukan tinjauan teori dan data hasil penelitian dari pustaka atau

hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang terkait dengan tema kajian. Data dari pustaka dan hasil-hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Jejaring Kemitraan Agribisnis dalam Pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pihak-pihak yang selama ini telah berperan aktif dalam pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Sukoharjo, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3, sebagai berikut.

Tabel 3. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Jejaring Agribisnis (*Stakeholders*) Pada Pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo

No	Lembaga	<i>Stakeholders</i>
1	Pelaku Usaha (UKM)	Supplier Bibit/Saprodi
2	Pelaku/Kelompok Usaha (UKM)	Sentra Pertanian Organik
3	Pelaku/Kelompok Usaha (UKM)	Sentra Peternakan Sapi
4	Pelaku/Kelompok Usaha (UKM)	Sentra Industri Tahu
5	Pelaku/Kelompok Usaha (UKM)	Sentra Jamur
6	Pelaku/Kelompok Usaha (UKM)	Sentra Makanan Olahan
7	Pelaku Usaha (UKM)	Lembaga Pemasaran
8	Pemerintah Daerah	Bappeda Sukoharjo
9	Asosiasi/Forum	FEDEP ( <i>Forum for Economic Development and Employment Promotion</i> )
10	Pemerintah Daerah (SKPD)	Dinas Pertanian
11	Pemerintah Daerah (SKPD)	Dinas Peternakan
12	Pemerintah Daerah (SKPD)	Dinas Koperasi dan UKM
13	Pemerintah Daerah (SKPD)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
14	Pemerintah Daerah (SKPD)	Dinas Tenaga Kerja
15	Pemerintah Daerah (SKPD)	Badan Lingkungan Hidup
16	Lembaga Pembiayaan	Perbankan
17	Lembaga Penelitian	Lembaga Penelitian/Teknologi (Balitbang)
18	Pelaku Usaha	Industri Pengolahan
19	Perguruan Tinggi	BDS LPPM UNS

---

Sumber : Analisis Data Primer

Tabel 3 menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo, dari berbagai unsur baik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, SKPD atau dinas terkait, pelaku usaha (UKM) baik perorangan maupun kelompok UKM (sentra UKM), Asosiasi/forum, lembaga penelitian, Perguruan Tinggi, lembaga pembiayaan, dan *Non Government* (NGOs). Pihak-pihak tersebut selama ini secara aktif sudah berperan dengan baik melalui berbagai program atau kegiatan yang dilakukan oleh setiap lembaga tersebut sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing, akan tetapi dalam implementasi program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing pihak tersebut masih belum terkoordinasi atau kurang adanya sinergi program antara lembaga satu dengan lembaga yang lain atau kurang terintegrasi, masih berjalan sendiri-sendiri, dan tidak focus, serta pendekatan program atau kegiatan masih bersifat *top down*, sehingga program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak tersebut dalam pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi kurang optimal, karena seringkali terjadi tumpang tindih antar program atau kegiatan, dan tidak jarang pula program atau kegiatan yang tidak sesuai dengan masalah atau kebutuhan para peternak sapi.

**b. Peran Jejaring Kemitraan Agribisnis dalam Pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo**

Berdasarkan kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam jejaring kemitraan agribisnis sudah melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dengan baik, akan tetapi masih belum terintegrasi, terutama dalam pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo. Adapun peran dari setiap pihak yang terlibat dalam jejaring agribisnis peternakan sapi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4, sebagai berikut.

Tabel 4. Peran *Stakeholders* Dalam Jejaring Agribisnis Pada Pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo

No	<i>Stakeholders</i>	<i>Peran Stakeholders</i>
1	<i>Supplier</i> Bibit/Saprodi	Menyediakan kebutuhan bibit sapi/ sapi bakalan, alat produksi, pakan ternak
2	Sentra Pertanian Organik	Menyediakan pakan ternak dari limbah pertanian organik dan produk komoditas pertanian yang berkualitas tinggi
3	Sentra Peternakan Sapi	Menghasilkan limbah ternak untuk bahan pupuk organik
4	Sentra Industri Tahu	Menyediakan pakan ternak dari limbah tahu yang berkualitas tinggi
5	Sentra Jamur	Menyediakan pakan ternak dari limbah media jamur yang berkualitas tinggi
6	Sentra Makanan Olahan	Mengolah produk hasil pertanian organik menjadi produk makanan olahan yg higienis dan sehat
7	Lembaga Pemasaran	Mendistribusikan produk yang berkualitas, sesuai pesanan dan kebutuhan konsumen, harga bersaing , volume penjualan tinggi, dan waktu pengiriman
8	Bappeda Sukoharjo	Mengkoordinasikan program SKPD terkait dalam pengembangan UMKM
9	FEDEP	Forum komunikasi antara SKPD terkait dalam pengembangan UMKM dan advokasi kebijakan dan program pengembangan UMKM
10	Dinas Pertanian	Mengkoordinasikan program kegiatan UMKM terkait dalam penyediaan saprodi, pakan ternak dari komoditas pertanian dan pengolahan pasca panen
11	Dinas Peternakan	Mengkoordinasikan program kegiatan UMKM terkait dalam pembinaan teknis dan manajemen pengelolaan ternak, mulai dari pemilihan bibit, pemeliharaan, kawin, dan kesehatan hewan
12	Dinas Koperasi dan	Mengkoordinasikan program kegiatan UMKM

	UKM	terkait dalam penyediaan modal dan pembinaan koperasi/UMKM bagi peternak
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Mengkoordinasikan program kegiatan UMKM terkait dalam pengolahan dan pendistribusian sapi dan produk olahan ternak sapi
14	Dinas Tenaga Kerja	Mengkoordinasikan program kegiatan UMKM terkait dalam penyediaan dan peningkatan SDM, serta pengawasan tenaga kerja di sektor informal
15	Badan Lingkungan Hidup	Mengkoordinasikan program kegiatan UMKM terkait dalam aspek lingkungan, pengolahan dan pemanfaatan limbah ternak sapi
16	Perbankan	Mengkoordinasikan program kegiatan UMKM terkait dalam aspek pembiayaan melalui kredit perbankan
17	Lembaga Penelitian/Teknologi	Melakukan riset dan pengembangan teknologi produksi ternak sapi yang berkualitas dan implementatif
18	Industri Pengolahan	Menghasilkan produk olahan pertanian terpadu yang sesuai pesanan, baik dari kualitas, jumlah, harga dan waktu pengiriman
19	BDS LPPM UNS	Mengkoordinasikan kegiatan pendampingan UMKM terkait berbagai kegiatan manajemen usaha
20	NGO's	Mengkoordinasikan kegiatan pendampingan UMKM

---

Sumber : Analisis Data Primer

Tabel 4 menunjukkan bahwa peran *stakeholders* atau pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo, yaitu peran pihak pemerintah melalui dinas terkait dalam mengkoordinasikan program kegiatan UMKM sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi setiap dinas terkait masing-masing. Sedangkan peran sentra UMKM terkait yaitu dalam menyediakan produk yang dihasilkannya bagi kebutuhan bahan baku atau bahan penunjang bagi sentra UMKM lain, sehingga antar sentra UMKM terintegrasi satu sama lain, saling menunjang/mendukung, saling tergantung, dan saling menguntungkan, dari

hulu sampai dengan hilir, dan hal tersebut sesuai dengan prinsip kemitraan usaha. Peran lembaga penunjang seperti supplier, lembaga pemasaran, lembaga pembiayaan (perbankan), asosiasi/forum, lembaga penelitian/riset, Perguruan Tinggi, dan NGOs berperan sebagai lembaga-lembaga penunjang, yang sangat berperan dalam menggerakkan peran dari setiap pihak mulai dari hulu sampai dengan hilir, melalui kegiatan penyediaan saprodi, pemasaran, penyediaan teknologi/hasil riset, fasilitasi konsultasi, pendampingan usaha, pemberdayaan UMKM, secara berkesinambungan.

**c. Kondisi yang Diperlukan dalam Meningkatkan Peran Jejaring Kemitraan Agribisnis pada Pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo**

Berdasarkan kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa kondisi yang diperlukan dalam meningkatkan peran jejaring agribisnis, pada pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5, sebagai berikut.

Tabel 5. Kondisi Yang Diperlukan *Stakeholders* dalam Jejaring Agribisnis Pada Pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo

<i>Stakeholders</i>	<b>Kondisi Yang Diperlukan</b>
<i>Supplier</i> Bibit/Saprodi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan bibit sapi/sapi bakalan, saprodi, alat produksi, yang kontinyu</li> <li>• Akses pasar yang mudah</li> </ul>
Sentra Pertanian Organik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai</li> <li>• Adanya komitmen bersama kelompok</li> <li>• Ketersediaan produk pertanian dan limbah pertanian organik</li> <li>• Akses pasar yang mudah</li> <li>• Ketersediaan teknologi produksi yang memadai</li> <li>• Manajemen usaha yang baik</li> <li>• Ketersediaan modal yang memadai</li> <li>• Standarisasi produk pertanian organik</li> <li>• Infrastruktur sarana dan prasarana distribusi yang memadai</li> </ul>
Sentra Peternakan Sapi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen bersama kelompok</li> <li>• Ketersediaan bibit sapi/sapi bakalan, saprodi, alat produksi, yang terjamin</li> <li>• Akses pasar yang mudah</li> </ul>

- Ketersediaan teknologi produksi yang memadai
  - Manajemen usaha yang baik
  - Ketersediaan modal yang memadai
  - Standarisasi produk peternakan sapi
  - Infrastruktur sarana dan prasarana distribusi yang memadai
- Sentra Industri Tahu
- Adanya komitmen bersama kelompok
  - Akses pasar yang mudah
  - Ketersediaan limbah tahu (ampas dan air limbah tahu)
  - Ketersediaan teknologi produksi yang memadai
  - Manajemen usaha yang baik
  - Ketersediaan modal yang memadai
  - Standarisasi produk tahu/tempe
  - Infrastruktur sarana dan prasarana distribusi yang memadai
- Sentra Jamur
- Adanya komitmen bersama kelompok
  - Akses pasar yang mudah
  - Ketersediaan limbah media jamur
  - Ketersediaan teknologi produksi yang memadai
  - Manajemen usaha yang baik
  - Ketersediaan modal yang memadai
  - Standarisasi produk jamur dan olahan jamur
  - Infrastruktur sarana dan prasarana distribusi yang memadai
- Sentra Makanan Olahan
- Adanya komitmen bersama kelompok
  - Ketersediaan produk makanan olahan yang berkualitas tinggi
  - Akses pasar yang mudah
  - Ketersediaan teknologi produksi yang memadai
  - Manajemen usaha yang baik
  - Ketersediaan modal yang memadai
  - Standarisasi produk makanan olahan
  - Infrastruktur sarana dan prasarana distribusi yang memadai
- Lembaga Pemasaran
- Ketersediaan produk organik/produk olahan yang terjamin
  - Akses pasar yang mudah
  - Manajemen usaha yang baik
  - Infrastruktur sarana dan prasarana distribusi yang memadai
- Bappeda Sukoharjo
- Adanya lembaga intermediasi
  - Adanya forum komunikasi bersama
  - Adanya regulasi yang mendukung UMKM
  - Adanya fasilitas penunjang
  - Infrastruktur dukungan dana operasional

<p>FEDEP (<i>Forum for Economic Development and Employment Promotion</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen bersama <i>stakeholders</i></li> <li>• Adanya lembaga intermediasi</li> <li>• Adanya regulasi yang mendukung UMKM</li> <li>• Adanya fasilitas penunjang (kantor)</li> <li>• Infrastruktur dukungan dana operasional</li> </ul>
<p>Dinas Pertanian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kelompok UMKM</li> <li>• Adanya lembaga intermediasi</li> <li>• Adanya forum komunikasi bersama</li> <li>• Adanya regulasi yang mendukung UMKM</li> <li>• Adanya fasilitas penunjang (teknologi produksi)</li> <li>• Infrastruktur dukungan dana operasional</li> </ul>
<p>Dinas Peternakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kelompok UMKM</li> <li>• Adanya peningkatan skill SDM UMKM</li> <li>• Adanya lembaga intermediasi</li> <li>• Adanya forum komunikasi bersama</li> <li>• Adanya regulasi yang mendukung UMKM</li> <li>• Adanya fasilitas penunjang</li> <li>• Infrastruktur dukungan dana operasional</li> </ul>
<p>Dinas Koperasi dan UKM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kelompok UMKM</li> <li>• Adanya lembaga intermediasi</li> <li>• Adanya forum komunikasi bersama</li> <li>• Adanya fasilitas penunjang</li> <li>• Infrastruktur dukungan dana operasional</li> </ul>
<p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kelompok UMKM</li> <li>• Adanya peningkatan skill SDM UMKM</li> <li>• Adanya lembaga intermediasi</li> <li>• Adanya forum komunikasi bersama</li> <li>• Adanya regulasi yang mendukung UMKM</li> <li>• Adanya fasilitas penunjang (teknologi produksi)</li> <li>• Infrastruktur dukungan dana operasional</li> </ul>
<p>Dinas Tenaga Kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peningkatan skill SDM UMKM</li> <li>• Adanya lembaga intermediasi</li> <li>• Adanya forum komunikasi bersama</li> <li>• Adanya regulasi yang mendukung UMKM</li> <li>• Adanya fasilitas penunjang (teknologi)</li> <li>• Infrastruktur dukungan dana operasional</li> </ul>
<p>Badan Lingkungan Hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya lembaga intermediasi</li> <li>• Adanya forum komunikasi bersama</li> <li>• Adanya regulasi yang mendukung UMKM</li> <li>• Adanya fasilitas penunjang (teknologi pengolahan limbah)</li> <li>• Infrastruktur dukungan dana operasional</li> </ul>
<p>Perbankan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya lembaga intermediasi</li> <li>• Adanya forum komunikasi bersama</li> </ul>



Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya regulasi yang mendukung pembiayaan UMKM</li> <li>• Adanya fasilitas penunjang (kredit bunga lunak)</li> </ul>
Penelitian/Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peningkatan skill SDM UMKM</li> <li>• Adanya lembaga intermediasi</li> <li>• Adanya forum komunikasi bersama</li> <li>• Adanya regulasi yang mendukung riset dan pengembangan teknologi</li> <li>• Adanya fasilitas penunjang (teknologi)</li> </ul>
Industri Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur dukungan dana operasional</li> <li>• Adanya peningkatan skill SDM UMKM</li> <li>• Ketersediaan bahan baku yang terjamin</li> <li>• Akses pasar yang mudah</li> <li>• Ketersediaan teknologi produksi yang baik</li> <li>• Manajemen usaha yang baik</li> <li>• Ketersediaan modal yang memadai</li> <li>• Standarisasi produk olahan</li> <li>• Infrastruktur sarana dan prasarana distribusi yang memadai</li> </ul>
BDS LPPM UNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peningkatan skill SDM UMKM</li> <li>• Adanya forum komunikasi bersama</li> <li>• Adanya regulasi yang mendukung UMKM</li> <li>• Adanya fasilitas penunjang (layanan, teknologi)</li> <li>• Infrastruktur dukungan dana operasional</li> </ul>
NGO's	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya lembaga intermediasi</li> <li>• Adanya peningkatan skill SDM UMKM</li> <li>• Adanya forum komunikasi bersama</li> <li>• Adanya regulasi yang mendukung UMKM</li> <li>• Adanya fasilitas penunjang (teknologi)</li> </ul>

---

Sumber : Analisis Data Primer

Tabel 5 menunjukkan bahwa kondisi yang diperlukan dalam meningkatkan peran *stakeholders* dalam pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo, antara lain adanya komitmen bersama kelompok, /sentra UMKM dan *stakeholders*, ketersediaan produk/produk olahan dan bahan baku yang memadai, akses pasar yang mudah, ketersediaan teknologi produksi yang memadai, manajemen usaha yang baik, ketersediaan modal yang memadai, standarisasi produk, infrastruktur sarana dan prasarana distribusi yang memadai. Selain itu juga adanya peningkatan skill SDM UMKM, adanya lembaga intermediasi, adanya forum komunikasi bersama, adanya regulasi yang mendukung UMKM,

adanya fasilitas penunjang (teknologi, layanan, kredit), infrastruktur dukungan dana operasional, dan lain-lain.

## **KESIMPULAN**

Pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo, dari berbagai unsur baik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, SKPD atau dinas terkait, pelaku usaha (UKM) baik perorangan maupun kelompok UKM (sentra UKM), Asosiasi/forum, lembaga penelitian, Perguruan Tinggi, lembaga pembiayaan, dan *Non Government* (NGOs).

Peran *stakeholders* jejaring agribisnis dalam pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo, antara lain dalam mengkoordinasikan program kegiatan UMKM sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi setiap dinas terkait masing-masing; menyediakan produk yang dihasilkannya bagi kebutuhan bahan baku atau bahan penunjang bagi sentra UMKM lain, sedangkan peran lembaga penunjang dalam penyediaan saprodi, pemasaran, penyediaan teknologi/hasil riset, fasilitasi konsultasi, pendampingan usaha, pemberdayaan UMKM.

Kondisi yang diperlukan dalam meningkatkan peran *stakeholders* jejaring agribisnis dalam pengembangan Klaster Usaha Peternakan Sapi di Kabupaten Sukoharjo, antara lain adanya komitmen bersama kelompok,/sentra UMKM dan *stakeholders*, ketersediaan produk/produk olahan dan bahan baku yang memadai, akses pasar yang mudah, ketersediaan teknologi produksi yang memadai, manajemen usaha yang baik, ketersediaan modal yang memadai, standarisasi produk, infrastruktur sarana dan prasarana distribusi yang memadai, peningkatan skill SDM UMKM, adanya lembaga intermediasi, adanya forum komunikasi bersama, adanya regulasi yang mendukung UMKM, adanya fasilitas penunjang (teknologi, layanan, kredit), infrastruktur dukungan dana operasional, dan lain-lain.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya penulisan artikel ini, kepada pihak-pihak terkait, terutama pihak Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP), atas terbitnya jurnal ini. Semoga sumbang saran penulis dapat memperkaya wawasan terkait dengan pengembangan agribisnis di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kunto dkk. 2010. *Strategi Pengembangan Agribisnis Melalui Agribusiness Development Center Dalam Membangun Kemitraan Agribisnis (Studi Pada Pengembangan Sentra Usaha Peternakan Sapi, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo)*. Laporan Penelitian. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis. Surakarta.
- Bappenas. 2004. *Kajian Strategis Pengembangan Kawasan Dalam Rangka Mendukung Akselerasi Peningkatan Daya Saing Daerah : Studi Kasus di Kelompok Industri Rotan-Cirebon, Logam-Tegal, dan Batik-Pekalongan*. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. BAPPENAS. Jakarta.
- Bappenas. 2005. *Panduan Pembangunan Kluster Industri Untuk Pengembangan Ekonomi Daerah Berdaya Saing Tinggi*. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal BAPPENAS. Jakarta.
- Downey, David, W., Erickson, P. Steven. 1987. *Manajemen Agribisnis*. Penerbit Airlangga. Jakarta
- Firdaus, M. 2008. *Manajemen Agribisnis*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hafsah, J, Mohammad. 2003. *Kemitraan Usaha : Konsep dan Strategi*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Soetrisno, Noer. 2003. *Strategi Penguatan UKM Melalui Pendekatan Kluster Bisnis : Konsep, Pengalaman Empiris dan Harapan*. Lutfansah Mediatama. Surabaya.
- Surakhmad, W. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito. Bandung.
- Widodo, Sri *et al.* 2003. *Peran Agribisnis Usaha Kecil dan Menengah Untuk Memperkokoh Ekonomi Nasional*. Liberty. Yogyakarta.